

**TINJAUAN TINGKAT EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS
SERTA POTENSI RETRIBUSI TERMINAL
DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN PANGKEP**



PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. Terima	4-12-2006
Asal Dari	fak. Ekonomi
Banyaknya	1 (satu) lks
Harga	H
No. Inventaris	115/4-12-06
No. Klas	

Oleh :

A.IHSAN TRIPUTRAJAYA

A 111 02 077

**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2006**

**TINJAUAN TINGKAT EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS
SERTA POTENSI RETRIBUSI TERMINAL
DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN PANGKEP**



Oleh :

A.IHSAN TRIPUTRAJAYA

A 111 02 077

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi pada
Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin
Makassar

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

DRA. LALY DJAUHARIAH, MS

Pembimbing II

DRS. ANAS ISWANTO ANWAR, MA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, Puji hanya kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan akhir ini yang berjudul *Tinjauan Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Serta Potensi Retribusi Terminal dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangkep* dapat diselesaikan.

Dalam penyusunan tulisan ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin dan penulis banyak mengalami hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan dan bimbingan serta kerja sama yang ikhlas dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini penulis dapat rampungkan, penulis sadari hasil yang dicapai sangat jauh dari sempurna. Karenanya dari lubuk hati yang paling dalam perkenankan penulis menghaturkan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda dan Ibunda Tercinta yang sangat-sangat di cintai oleh penulis serta saudara-saudara penulis dan tak Lupa Buat Keluarga Besar Penulis, Buat Ipar dan Beloved Nephew yang selalu *give support and big attention to m.Thanks alot*

Pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dra. Laly Djauhariyah.MS selaku Pembimbing I yang selalu membantu penulis dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian studinya." Tidak ada yang dapat penulis berikan, hanya kata terima kasih serta permintaan maaf jika selama kuliah penulis pernah berbuat salah.
2. Bapak Anas Iswanto Anwar,SE, MA selaku Pembimbing II; Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi; Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Ekonomi UH, yang menjadi motivator penulis dalam menyelesaikan studinya.

3. Bapak Drs. Tadjuddin Parenta MS Selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi
4. Ibu DR.HJ. Rahmatia,MA Selaku Penasehat Akademik Penulis
5. Seluruh Staf Pengajar Ilmu Ekonomi UH, Bu Retno, Bu Sri, Pa Yusri, Pa Sabir (Ketangkap Basah Ma'), Pa Bahtiar (makasih Banyak),Pa Jibril (Maaf kalo sa punya salah) yang telah mendidik dan membantu dalam penulisan skripsi ini.
6. Bu Fatma Dan Pak Baso (maaf puang klo banyak salahku)
7. Prof Parman, Pak Malik, Ka Susi, K Santi, Pa Jamal dan Seluruh Staf akademik FE-UH
8. Pimpinan, Staff dan Karyawan Dinas Perhubungan Pangkep
9. Pimpinan , Staff dan Karyawan Dinas Pendapatan Daerah Kab. Pangkep
10. Yoszeth and Gito Selaku Pembimbing bayangan yang membuat penulis merasa Pusing, Senang, dan Kaku
11. Seluruh Kerabat dan teman yang tidak sempat kutorehkan namanya pada kertas ini. Semoga seluruh bantuan yang diberikan mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amien.

Dan Akhirnya Penulis Berharap Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya dan dapat dipergunakan untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dimasa yang akan datang Amien...

Makassar, November 2006

A.IHSAN TRIPUTRAJAYA



*These are the days worth living
These are the years we're given
And these are the moments
These are the times
Let's make the best out of our lives..*

*Special Thanks To All My Brothers At SPES PATRIAE
Anil,BangCondet,Opik,Bang Coca,Hardcore,Callu,Gokart,
Anaknya Pa Narwis, Acil, Juphe,IIman,Herman,Edo,Aco, Adit
Gito,Aksar,Dedi,Chris John,Alimin,Opa*

*Mathdekumals,Rendrad'Kumals,TakkoSdaBrandals, Taqbeeraholic,Oga
CuekClubbers dan Semua Pejantan Tambunnya Spes Patriae yang ga sempet dimasukin
kesini.. Ladies SpesPatriae ,PuputCutebgt abis ampe mampus?,None,Dila,
KikyBondeng, Septi, CindyKuCindymu , Bunga,Hj.Riri, Mia,Uswa,Anie,Wawa
(Tridente Sarjana), Ratu,Kiki,Kuku,Salma,Asnina,Ully,Astri,Erni, dan Semua Spes
Patriae lady yg sy cintai*

At D'Kumals

*Rival D'KillZ, Mathz,RendRaz, MailD BaboLs
..... (sebuah band yang penuh akan Realita, Cinta dan Rock N Roll)*

At Brandals On The Move

Isucks, Jose mauRinto, Dj Oupick Djoeloenk, Taqbeeraholic,CuekClubbers,Areef,Atzilia

At Economix-Max

*Aslam, #na , K Mario, CepoT,JuPet,Eky Dagu,Abie. SOLID 2003 (Ulfa Cs ,coDe,Fajar,
Ikram,Ilo,Anda,Arham ...jayalah Sp Corps), Musketeer 04(Onto,Turtles,Pitto Cs, Jikun Cs..
Sa Percayakan Himajie pada anda) 05 Sp Nining,Arti (mksh mknnnya waktu di barru),04
Mng 04 Mbok Nur (ehmx agangku),Dial,Iccank juga, Icha Cs 05Mng. .DarmaBusyu,
DeaNK, Etha,Mega,Asist2Riri,Ndu,AnnieRumposa (Rumpun Pongtiku dan sekitar).. 06 Mng
Nidjiaholic... (guess Who da lucky gals, lupa mksh da pilihin dress codenye..)*

XXX

Yuni,NiTa,Tia.....you gave me coloured

My Cigars

Lucky Strike,Djarum Black,BlackTea,Mild,ClasMild, Marlboro,Dan Mini....

T4 Kreditku:

Mama Malania, Mama Ajie,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Penerimaan Pemerintah Daerah	7
2.2 Pendapatan Asli Daerah	8
2.3 Pengertian Retribusi	15
2.4 Pengertian Terminal	20
2.5 Efektifitas dan Efisiensi Retribusi	21
2.6 Potensi Penerimaan Retribusi	22
2.7 Hipotesis	22
BAB III. METODE PENELITIAN	24
3.1 Kerangka Konseptual	24
3.2 Tempat Penelitian	26
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	26
3.4 Jenis dan Sumber Data	26
3.4.1. Jenis Data	26
3.4.2. Sumber Data	27
3.5 Metode Analisis	28
3.6 Batasan variabel	29
3.7 Sistematika Pembahasan.....	30

BAB IV. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	32
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Pangkep.....	32
4.2. Sumber-Sumber Penerimaan Daerah kab.Pangkep.....	33
4.3. Target dan Realisasi Retribusi terminal Kab.Pangkep 2000 – 2004	40
4.4. Analisis Efektifitas	42
4.5. Analisis Efisiensi	43
4.6. Analisis Potensi Penerimaan Retribusi terminal	47
4.7. Hubungan Antara Target, Potensi, dan Realisasi	50
4.8. Kontribusi Penerimaan Retribusi Terminal Terhadap PAD Kab.Pangkep.....	51
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran-saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58
Lampiran-Lampiran	61

DAFTAR TABEL

Tabel I Komponen Penerimaan PAD Kabupaten Pangkep Tahun anggaran 2000-2004 (dalam Rupiah).....	3
Tabel 4.1. Perkembangan Realisasi PAD Kabupaten Pangkep Tahun 2000 – 2004.....	38
Tabel 4.2. Target dan realisasi Retribusi Terminal di Kab.Pangkep Tahun 2000 – 2005.....	41
Tabel 4.3 Belanja Rutin Dinas Perhubungan Kab.Pangkep Tahun Anggaran 2001 s/d 2005.....	44
Tabel 4.4 Perhitungan Efisiensi Retribusi Terminal DiKabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2001 s/d 2005.....	46
Tabel 4.5.Jenis Kendaraan Yang Beroperasi	47
Tabel.4.6.Perhitungan Potensi Retribusi Terminal Kab.Pangkep Tahun anggaran 2004-2006	49
Tabel 4.7. Hubungan Antara Potensi dan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal kab.Pangkep.....	50
Tabel 4.8.Kontribusi Retribusi Terminal Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab Pangkep.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Realisasi Penerimaan Rutin Pendapatan Asli Daerah Kabupaten

Pangkep tahun anggaran 1988/1999 – 2003/2004

Lampiran 2 Realisasi Pengeluaran Rutin dan Pembangunan Daerah Kabupaten

Pangkep Tahun anggaran 1988/1999 – 2003/2004

Lampiran 3. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2004

Lampiran 4 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2004

Lampiran 5 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Lain tahun Anggaran

2004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Titik utama pembangunan dewasa ini diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan dan dalam rangka mencapai tujuan Negara seperti tercantum dalam alinea ke-4 pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang bertujuan agar seluruh masyarakat Indonesia dapat sejahtera, maka pembangunan disegala bidang harus dilaksanakan secara bertahap, dan berkelanjutan disamping itu memerlukan biaya yang besar walaupun dana yang tersedia sangat terbatas. Untuk itu diperlukan suasana yang mendukung cita-cita pembangunan serta memanfaatkan segenap kemampuan modal dan potensi dalam negeri/daerah.

Konsep Otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ialah membentuk sistem baru bagi pemerintahan di daerah. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah lebih mengerti dan mengetahui kebutuhan masyarakat didaerahnya. Otonomi daerah membuka peluang , tantangan dan kendala terutama kepada daerah kabupaten dan kota untuk lebih leluasa mengelola pembangunan didaerahnya masing-masing sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Menurut Pamudji (1980: hal 61-62) “ pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan Pembangunan” . Salah satu masalah pokok dalam proses pembangunan adalah peningkatan pemupukan sumber-sumber pembiayaan dan untuk meningkatkan pembiayaan sumber-sumber pembangunan sangat tergantung pada kebijaksanaan pemerintah. Dalam kaitan dengan hal tersebut . maka dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pokok-pokok pemerintah Daerah telah diberikan kewenangan untuk memungut sumber-sumber pendapatan daerah dan menggali sumber-sumber pendapatan yang baru.dan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerahnya baik secara ekstensif maupun secara intensif sebagai wujud nyata otonomi , mengingat pengembangan dan penggalian potensi-potensi PAD sebenarnya sudah merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak dan sangat mendukung terwujudnya pelaksanaan otonomi yang utuh, nyata dan bertanggung jawab di daerah kabupaten . Dan hal ini berarti jika terjadi peningkatan PAD akan membawa daerah kearah kemajuan perekonomian daerah yang akan berdampak pada peningkatan pembangunan didaerah.

Maka oleh sebab itu pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kecakapan pengolahan keuangan baik dari segi tata usaha yakni penerimaan maupun pengeluaran. Untuk meningkatkan kempuan dan peranan pemerintah dibidang keuangan dan ekonomi daerah maka telah ditempuh rangkaian kebijakan yang diarahkan untuk terciptanya kemandirian dan kemampuan daerah dalam mengelola potensi daerah yang ada. Hal ini diindikatori karena pajak daerah

selama ini meruakan sumber pendapatan daerah yang paling dominan, berdasarkan alur pikir teori keuangan daerah, penerimaan pajak pada umumnya digunakan untu membiayai jasa layanan yang bersifat murni public (*public goods*), sedangkan penerimaan retribusi umumnya digunakan untuk membiayai jasa pelayanan yang bersifat semi public (*semi public goods*) dimana komponen manfaat bagi individunya lebih besar.

Pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagai komponen PAD memiliki potensi yang cukup besar dalam membiayai pembangunan daerah bilamana pemungutannya dilaksanakan secara intensif adan optimal.

Tabel 1. Komponen Penerimaan PAD Kabupaten Pangkep

Tahun anggaran 2000-2004 (dalam Rupiah)

Penerimaan PAD	2000	2001	2002	2003	2004
Pajak daerah	7.862.042.417	15.727.346.582	17.548.861.552	16.101.585.411	15.513.352.468
Retribusi Daerah	1.181.663.826	2.431.743.854	3.155.729.029	6.021.403.843	5.901.100.419
Bagi Laba Usaha	358.595.571	428.230.168	690.743.224	1.247.817.950	2.440.168.160
Penerimaan PAD Lainnya	610.816.387	475.005.568	1.032.429.694	2.095.997.613	3.057.987.073
Jumlah PAD	10.013.118.202	19.062.326.172	22.427.763.499	25.466.804.817	26.912.608.120

Sumber : Dispenda kab.Pangkep

Sehubungan dengan itu Peran Retribusi khususnya retribusi terminal sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat potensial memerlukan suatu sistem, paling tidak pemerintah daerah harus memiliki dedikasi dan partisipasi

yang tinggi dengan sepenuh hati mengabdikan diri kepada misi dan tugas yang luhur dan mulia itu.

Menurut Harits (1995 :hal 81) bahwa dalam mengoptimalkan PAD daerah kabupaten/kota, sektor retribusi daerah merupakan sektor yang sangat besar untuk digali dan diperluas pengelolaannya secara efisien dan efektif tanpa mengesampingkan potensi pengembangannya karena retribusi daerah dipungut atas balas jasa yang disediakan pemerintah daerah

Disamping itu tersedianya perangkat pemerintah, baik dari segi kuantitas dan ditambah tersedianya fasilitas kerja yang memadai , kesadaran wajib retribusi yang cukup tinggi , tentu dengan sendirinya pemungutan retribusi terminal akan meningkat dan pada gilirannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan meningkat pula

Berdasarkan Pernyataan tersebut diatas, akan muncul potensi-potensi di daerah-daerah pada umumnya, dalam hal ini dikhususkan pada kabupaten Pangkajene dan kepulauan. Disatu pihak Daerah memiliki keinginan yang besar untuk mengelola retribusi secara optimal, dan dilain pihak daerah terhambat pada keterbatasan perangkat,fasilitas kerja dan kesadaran wajib retribusi baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitasnya.

Mengingat perkembangan daerah yang demikian pesat dimana pertumbuhan penduduk, urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi mengakibatkan permintaan terhadap jasa –jasa khususnya jasa terminal dalam kabupaten khususnya di kabupaten pangkajene dan kepulauan diperkirakan akan terus meningkat sehingga

retribusi terminal dikategorikan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup memberikan kontribusi bagi penerimaan daerah.

Pada inti uraian penjelasan yang tertera diatas, penulis tertarik untuk menulis judul

“Tinjauan tingkat Efisiensi dan Efektifitas serta Potensi Retribusi Terminal Dalam Meningkatkan PAD Kab. Pangkajene dan Kepulauan :”

B. Rumusan Masalah

Salah satu sumber pendapatan Asli Daerah Kab.Pangkajene dan Kepulauan diperoleh dari retribusi terminal, akan tetapi kontribusi retribusi yang diharapkan pemerintah daerah tiap tahunnya kadang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Untuk membahas permasalahan tersebut, penulis mencoba mengemukakan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Seberapa besar tingkat efektifitas dan Efisiensi dari penerimaan retribusi terminal kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai tolak ukur dalam mengupayakan kebijakan untuk mencapai hasil yang optimal.
2. Seberapa besar potensi dari retribusi terminal kabupaten.Pangkep
3. Seberapa besar kontribusi dari Retribusi terminal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas yang diperoleh melalui retribusi terminal Kab.Pangkajene dan Kepulauan
2. Untuk mengetahui potensi retribusi terminal Kab.Pangkajene dan Kepulauan.
3. Untuk mengetahui berapa besar kontribusi retribusi terminal dalam meningkatkan PAD Kab.Pangkajene dan Kepulauan.

Kegunaan Penelitian

1. Sebagai input bagi pemerintah daerah serta yang terlibat langsung agar mampu mengobservasi dan mengefektifkan retribusi terminal sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kab.Pangkajene dan Kepulauan
2. Sebagai sumber pemikiran maupun alternatif referensi yang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam melakukan kajian lebih lanjut tentang efektifitas retribusi terminal khususnya Kab.Pangkajene dan Kepulauan
3. Sebagai salah satu syarat bagi penulis sebagai mahasiswa dalam memperoleh gelar sarjana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penerimaan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan perundangan-undangan yang berlaku.

Adapun sumber-sumber pendapatan untuk membiayai APBD terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah itu sendiri terbagi atas :

- Pajak Daerah
- Retribusi
- Hasil Perusahaan Daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- Dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

2. Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah untuk membiayai kebutuhan akan daerahnya itu sendiri dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

- Bagi hasil (bagian daerah) dari pajak bumi dan Bangunan , bea peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam.
- Dana Alokasi Umum

Yaitu dana yang berasal dari APBN , yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka desentralisasi

- **Dana Alokasi Khusus**

Yaitu dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Pengalokasian dana alokasi khusus ditentukan dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN

3. Pinjaman Daerah

Pinjaman Daerah yaitu semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Lain-lain penerimaan yang sah antara lain, hibah dana darurat dan penerimaan lain yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. PAD diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.

Saragih, (1996:hal 37-38) mengatakan bahwa pembangunan daerah merupakan bagian integral dan merupakan penjabaran pembangunan nasional. Dalam

rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional dengan potensi, aspirasi dan permasalahan pembangunan diberbagai daerah yang dicanangkan pemerintah. Keseluruhan program pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan kemampuan keuangan Negara. Disamping itu kunci kesuksesannya dalam mencapai sasaran pembangunan daerah secara efisien dan efektif. Konsentrasi pemerintah dalam meningkatkan pembangunan daerah sejalan dengan semangat otonomi daerah dan pelaksanaan desentralisasi.

Keterbatasan dana pusat bagi pembangunan daerah memerlukan strategi pengelolaan dan pengembangan sumber-sumber keuangan daerah bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tiap-tiap daerah. Strategi pengelolaan dan pengembangan sumber-sumber keuangan daerah bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah pertama, strategi yang berkaitan dengan manajemen pajak atau retribusi daerah, kedua, strategi ekstensifikasi sumber pendapatan daerah; ketiga, strategi dalam rangka peningkatan efisiensi institusi

Widayat (1994 hal32), menguraikan beberapa cara untuk meningkatkan pendapatan semua sumber PAD Agar mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensialnya.

Selanjutnya dikatakan bahwa secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah sehingga maksimal, yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Lebih lanjut dikemukakan bahwa salah satu wujud nyata dari kegiatan intensifikasi ini untuk retribusi yaitu menghitung potensi seakurat mungkin, maka target penerimaan bisa mendekati potensinya. Arah ekstensifikasi

dilakukan dengan dengan mengadakan penggalian-penggalan sumber-sumber objek retribusi atau pajak ataupun dengan cara menjaring wajib pajak baru. Sehubungan dengan hal tersebut, Mardiasmo dan Makhfatih (2000:hal 8) telah pula menguraikan bahwa

“ potensi penerimaan daerah adalah kekuatan yang ada disuatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu. Untuk pengetahuan tentang perkembangan beberapa variable –variabel yang dapat dikendalikan’ (yaitu variabel-variabel kebijakan dan kelembagaan) dan ‘ yang tidak dapat dikendalikan ‘ (yaitu variabel-variabel ekonomi) yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber-sumber daerah dalam menghasilkan sejumlah penerimaan.

Adapun kewenangan daerah untuk memungut PAD diatur dalam Undang-Undang No.18 tahun 1997 sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang jenis-jenis pajak daerah yang lebih mencerminkan keleluasaan kepada daerah dan dikelompokkan menjadi pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

1.Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, pajak daerah merupakan sumber penerimaan terbesar dibandingkan dengan jenis penerimaan lainnya. Persentase penerimaan pajak provinsi mencapai rata-rata di atas 70% dari PAD selama berlangsungnya otonomi daerah.

Kebijakan pungutan pajak daerah berdasarkan perda, diupayakan tidak berbenturan dengan pungutan pusat (pajak maupun bea dan cukai), karena hal tersebut akan menimbulkan duplikasi pungutan yang ada dan pada akhirnya akan mendistorsi kegiatan perekonomian.

Prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang baik, harus memenuhi kriteria umum perpajakan daerah yaitu sebagai berikut :

- Prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya mudah dapat naik turun mengikuti naik-turunnya tingkat pendapatan masyarakat.
- Adil dan merata secara vertical artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat dan horizontal artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak.
- Administrasi yang fleksibel, artinya sederhana, mudah dihitung, pelayanan memusatkan bagi si wajib pajak.
- Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
- Non-distorsi terhadap perekonomian : implikasi pajak atau pungutan yang hanya menimbulkan suatu beban tambahan yang berlebihan, sehingga merugikan masyarakat secara menyeluruh. (Machfud Sidik, 2002, Hal 3).

Dalam mempertahankan prinsip-prinsip tersebut, maka diperlukan suatu ciri-ciri tertentu. Pada Negara sedang berkembang ciri-ciri khusus tersebut antara lain:

- Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pungutannya.
- Relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastic dan ada kalanya menurun secara tajam.
- Tax basenya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan dan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*).

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah pemberian kewenangan untuk mengadakan pungutan pajak selain mempertimbangkan criteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara umum, seyogyanya harus mempertimbangkan ketepatan suatu pajak sebagai pajak daerah. Pajak daerah yang baik merupakan pajak yang mendukung pemberian kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi (Machfud Sidik, 2002 hal 3)

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah suatu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah selayaknya pajak daerah merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan



pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai salah satu sumber PAD, retribusi menempati urutan kedua setelah pajak daerah. Persentase penerimaan retribusi daerah yang tiap tahunnya mengalami peningkatan selama berlangsungnya otonomi daerah. Yang termasuk golongan retribusi atau jenis retribusi daerah yaitu :

- Jenis-jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintah berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang
- Dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
- Hasil penerimaan jenis retribusi tertentu daerah kabupaten sebagian diperuntukkan kepada desa dan penetapannya dengan perda kabupaten dengan memperhatikan aspek keterlibatan desa dalam penyediaan layanan tersebut.

3. Hasil Perusahaan Daerah

Perusahaan daerah adalah suatu badan usaha yang dilaksanakan daerah untuk memperoleh dana dalam melaksanakan segala kegiatan daerah. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dimana laba perusahaan daerahlah yang diharapkan sebagai sumber pemasukan bagi daerah. Oleh karena itu dalam batas-batas tertentu

pengelolaan perusahaan daerah haruslah bersifat keahlian dan harus berpegang [ada prinsip efisiensi.

Dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, pengertian perusahaan daerah dirumuskan sebagai berikut :

“ Perusahaan daerah adalah suatu badan usaha yang dibentuk oleh daerah untuk mengembangkan perekonomian daerah dan untuk menambah penghasilan daerah berhubung dengan hal itu, maka perusahaan daerah harus didasarkan atas azas-azas ekonomi perusahaan yang sehat, atau dengan kata lain perusahaan daerah harus melakukan kegiatannya secara berdaya guna dan berhasil guna. Dalam hal ini perlu dicegah adanya kecenderungan-kecenderungan kearah sistem monopoli sebagaimana telah digariskan dalam GBHN.”

Berdasarkan uraian diatas , maka dapat dikatakan bahwa perusahaan daerah yang dimaksud untuk mengembangkan perekonomian agar diharapkan dapat menambah penghasilan daerah, agar dapat ber daya guna dan berhasil guna.

4. Penerimaan Lain-lain

Semua usaha lain-lain daerah yang sah tidak termasuk diatas sesuai ketentuan yang berlaku, penerimaan lain-lain yang sah dapat dipungut oleh daerah meliputi :

- a. Hasil atau ganti rugi penyerahan bibit ikan, bibit ternak, bibit tanaman pangan, dan bibit perkebunan.
- b. Hasil penjualan rumah atau barang milik Negara
- c. Hasil kegiatan lain yang berbentuk jasa usaha kepada masyarakat.

2.3. Pengertian Retribusi

Adapun definisi retribusi sebagai berikut :

2.3.1. Definisi Retribusi

R. Soedargo (1980, hal 27) menyebutkan bahwa : Retribusi adalah suatu pungutan sebagai pembayaran untuk jasa-jasa yang oleh Negara secara langsung diberikan kepada yang berkepentingan. Sedangkan menurut Bohari (1984, hal 22) Menyebutkan bahwa retribusi ialah pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka-mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara

Retribusi daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari rumah swasta berdasarkan norma-norma umum yang ditetapkan, berhubungan dengan prestasi yang diselenggarakan dengan dan untuk kepentingan masyarakat secara khusus yang dilaksanakan sendiri oleh penguasa public (Goedhart, 1982 : hal 55). Selanjutnya S. Prawirohadjono (1984 : hal 202) merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah baik langsung maupun tidak langsung

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, diketahui bahwa beberapa atau sebahagian besar PEMDA sebelum otonomi daerah belum mengoptimalkan penerimaan dan retribusi karena masih mendapat dana dari pemerintah pusat. Sebagai upaya untuk meningkatkan PAD, maka pengelolaan retribusi masih perlu dikaji untuk menentukan besarnya potensi yang riil (wajar), tingkat efektifitas dan efisiensi pemingutan retribusi terminal, supaya tidak justru sebaliknya, yaitu membebani anggaran daerah.

Devas, dkk, (1989 :hal 46) mengungkapkan bahwa pemerintahan daerah sangat bergantung dari Pemerintah Pusat. Dalam garis besarnya, penerimaan daerah (termasuk Pajak yang diserahkan) hanya menutup seperlima dari pengeluaran pemerintah daerah. Meskipun banyak pula Negara lain dengan keadaan yang sama atau lebih buruk lagi . Memang, Pemerintah Daerah tidak harus berdiri sendiri dari segi keuangan agar dapat memiliki tingkat otonomi yang berarti, yang penting adalah “ wewenang di tepi” artinya memiliki penerimaan daerah sendiri yang cukup sehingga dapat mengadakan perubahan disana sini apada tingkat jasa layanan yang disediakan. Untuk itu mungkin sudah memadai jika 20% dari pengeluaran berasal dari sumber-sumber daerah. Hal tersebut sejalan dengan uraian oleh McQueen (1998: hal 12-18) bahwa :

“ Pertimbangan lain dalam meningkatnya retribusi yaitu peran masyarakat (public) dalam politik. Masyarakat tidak senang terhadap perubahan dan hanya akan toleransi terhadap pembayaran retribusi , bukan semata-mata sebagai sumber utama pendapatan daerah”

Retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran memakai atau karena memperoleh jasa pelayanan langsung usaha milik daerah untuk kepentingan umum atau karena diberikan oleh daerah baik langsung ataupun tidak langsung. Sementara didalam undang-undang No.18 tahun 1997 pasal 1 Ayat 24 disebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran peakaian atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi/ badan.

Sementara itu didalam undang-undang Nomor 34 tahun 2000 yang menyempurnakan undang-undang no.18 tahun 1997 Pasal 1 nomor 26 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. menyebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.34 tahun 2000 retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri retribusi sebagai berikut :

1. Adanya jasa yang diberikan oleh Negara yang langsung dan dapat ditunjuk
2. Pelaksanaannya bersifat ekonomis, yaitu agar penggunaan jasa Negara dibatasi
3. Adanya balas jasa (Kontraprestasi) dirumah tangga swasta(rakyat)
4. Segala jasa Negara yang diberikan oleh Negara sesuai dengan tugas khususnya sebagai penguasa public

Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena diapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah maka dia tidak akan dikenakan iuran tersebut.

Oleh karena itu pembayaran atas penggunaan barang atau jasa kurang lebih atau yang disediakan untuk umum oleh pemerintah, maka penarikannya biasanya

dilakukan ditempat pemakaian itu , tetapi boleh juga ditagihkan kepada badan atau orang pribadi atas dasar pembayaran dengan penggunaan terbatas (dijatahkan) atau pembayaran yang menggunakan periode waktu yang disepakati. Retribusi Terminal, dapat dibayarkan berkala langsung ke kantor Dinas pendapatan Daerah (DISPENDA) atau ke kantor DLLAJ.

Hal diatas sejalan dengan uraian oleh McQueen (1998: hal 12-18)tentang permasalahan dan kebijaksanaan pelayanan oleh pemda. Dikatakan pula bahwa persaingan retribusi antar pemerintah daerah tidak akan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan tariff, yang penting yaitu bila ada pemda berdekatan mengadakan atau meyediakan barang atau jasa yang sama, maka saling tukar informasi menjadi penting untuk mengurangi resiko kerugian.

Lebih lanjut diuraikan pula definisi dan pengertian yang berkaitan dengan retribusi yaitu dikutip dari Sproule-jones and White yang menyatakan bahwa retribusi adalah semua bayaran yang dilakukan bagi perorangan dalam menggunakan layanan yang mendatangkan keuntungan langsung dari layanan itu. Lebih lanjut dikatakan bahwa retribusi lebih tepat dikatakan pajak konsumsi daripada biaya layanan, bahwa retribusi hanya menutupi biaya operasi saja.

Pada bagian lain McQueen (1998:hal 2) mengungkapkan bahwa suatu tanggapan menekankan dan memperjelas kenyataan bahwa masyarakat memandang retribusi sebagai bagian dari program bukan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan bersedia membayar hanya apabila pelayanan itu dioptimalkan.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa bagian yang mudah dalam menyusun retribusi yakni menghitung dan menetapkan tariff. Bagian

tersulitnya adalah meyakinkan masyarakat (*public*) tanpa diluar kesadaran mereka tariff tetap harus diberlakukan

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat dilihat sifat-sifat retribusi menurut Haritz (1995 hal 84) adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan bersifat ekonomis;
2. Ada imbalan langsung kepada pembayar
3. Iurannya memenuhi persyaratan, persyaratan formal dan material tetapi tetap ada alternatif untuk membayar;
4. Retribusi merupakan pungutan yang umumnya budgetairnya tidak menondjol;
5. Dalam hal tertentu , retribusi daerah digunakan untuk suatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dibukukan oleh pemerintah daerah untuk pemenuhan kebutuhan atau permintaan masyarakat.

Berkaitan dengan pendapat diatas, Davey (1988: hal 147) menguraikan bahwa didalam beberapa hal , retribusi mungkin lebih didasarkan pada *Recovering* daripada *Fullcost* dari suatu pelayanan , yaitu atas dasar mencari keuntungan. Salah satu dari tiga kasus yang diuraikan untuk mencari keuntungan diluar para pemakai bus elalui jawatan transportasi , lahan-lahan pada stasiun bis, dan lain-lain mungkin sebagian besar merupakan penghukuman golongan miskin.

Pada bagian akhir , Davey (1988: hal 153) menyimpulkan bahwa penerimaan retribusi mungkin jatuh dibawah tingkat yang dibutuhkan untuk mengoperasikan pelayanan secara efektif, karena kengganannya politik untuk meningkatkan tariff tau mengenakan sanksi. Suparmoko (1992 :hal 98-99) menguraikan bahwa kemampuan

untuk membayar pajak dan retribusi dapat diketahui dengan melihat besarnya pendapatan baik yang berasal dari tenaga kerja maupun yang berasal dari kekayaan dan besarnya pengeluaran si wajib pajak serta pengeluaran konsumsi esensial.

Musgrave (1993:hal 238), mengemukakan hal yang sama dengan diatas tentang prinsip dalam pengenaan pajak dan retribusi yang harus dipenuhi antara lain prinsip kemampuan untuk membayar (*ability -to-pay- Principle*) yakni orang-orang yang mempunyai kemampuan yang sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama. Sementara orang yang mempunyai kemampuan lebih besar harus membayar lebih besar. Wajib pajak yang memiliki kemampuan membayar sama dikenai pajak yang sama bebannya (*horizontal equity*), dan wajib pajak yang kemampuannya berbeda dikenai pajak yang berbeda pula bebannya (*vertical equity*).

2.4. Terminal

Terminal itu sendiri terdiri atas terminal penumpang dan terminal barang.

Terminal Penumpang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

Sedangkan Terminal Barang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang .

Terminal penumpang dikelompokkan atas :

- Terminal Penumpang type A yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota , antar provinsi, dan/atau angkutan lintas batas Negara, angkutan antar kota dan provinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan.

- Terminal penumpang type B yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dala provinsi, angkutan kota dan atau pedesaan.
- Terminal penumpang type C yang berfungsi melayanni kendaraan umum untuk angkutan pedesaan.

2.5. Efektivitas dan Efisiensi Retribusi

Penelitian tentang perhitungan potensi pajak dan retribusi yang dilakukan oleh Mardiasmo dan Makhfatih (2000: hal 5-6)menguraikan beberapa model untuk menghitung efektivitas, efisiensi, dan trend analysis. Selanjutnya diuraikan bahwa efektivitas yaitu mengukur hubungan antara hasil pungut (nilai realisasi) retribusi dengan potensi retribusi (target). Efisiensi diuraikan sebagai alat untuk mengukur bagian dari retribusi yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan retribusi yang bersangkutan .

Kata efektif berarti terjadinya suatu efek atau impact yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Kata efektif berarti berhasil, tepat, manjur, selanjutnya menurut Sodang S.P. (1992 : Hal 43) menyatakan secara spesifik bahwaa efektivitas berarti penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditentukan atau ditetapkan. Selanjutnya Lubis dan Husaini (1987:55) mengemukakan bahwa suatu kegiatan dianggap sangat efektif apabila target tercapai sesuai dengan konsep sasaran awal target. Kemudian kurang efektifnya diyakini apabila target yang telah ditetapkan, tidak sesuai dengan (jauh dibawah kurang) harapan akan target yang telah ditetapkan.

Potensi Penerimaan Retribusi

Dalam konteks penghimpunan sumber pendapatan daerah, biaya, sarana, tenaga dan cara yang digunakan merupakan masukan, sedangkan penerimaan daerah akan menjadi ukuran daripada keluaran.

Yang dimaksud dengan Potensi adalah: Daya, kekuatan.atau kesanggupan untuk menghasilkan penerimaan daerah, atau kemampuan yang pantas diterima dalam keadaan seratus persen.

Kesit B.P (2003; Hal 142) Potensi berdasarkan dapat diukur melalui dua pendekatan yakni:

1. Berdasarkan fungsi penerimaan
2. Berdasarkan atas Indikator Sosial ekonomi

2.6 Hipotesis

Berdasarkan pada masalah pokok yang dihadapi, maka dapat dibangun satu hipotesis yang berfungsi sebagai gerak acuan penelitian dan pengumpulan data. Oleh karena itu penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

- Diduga bahwa realisasi retribusi terminal di kab.Pangkep memiliki kecenderungan yang efektif dan efisien dalam menunjang pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah melalui peran retribusi, khususnya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Diduga bahwa retribusi terminal mempunyai potensi terhadap dalam penentuan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah

- Diduga bahwa kontribusi retribusi terminal terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan cukup signifikan selama tahun 1999-2004

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Konseptual

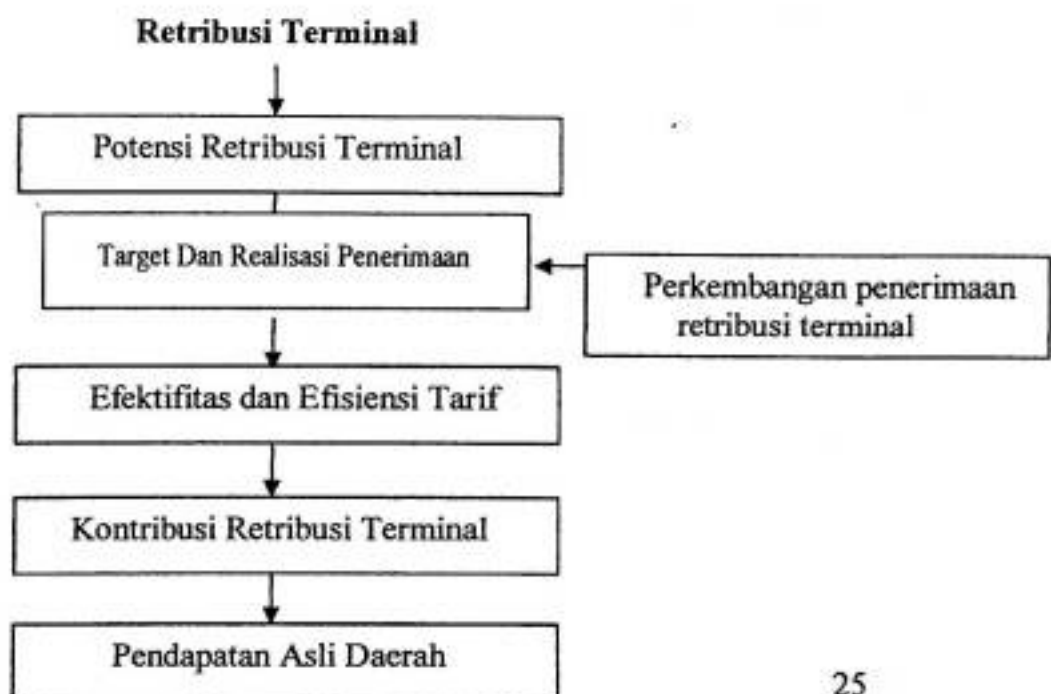
Dalam rangka mendorong perkembangan otonomi daerah yang nyata , dinamis, dan serasi dan bertanggung jawab, maka pembiayaan pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah haruslah dapat dikelola lebih efisien dan efektif sejalan dengan tuntutan pembangunan.

Pembangunan daerah yang berkembang pesat memerlukan biaya-biaya yang makin besar yang tidak dapat sepenuhnya dibiayai dari subsidi pemerintah pusat oleh karena itu pendayagunaan potensi daerah oleh pemerintah daerah Kabupaten Pangkajene dan kepulauan dituntut berperan serta dalam menjalankan roda pembangunan yang sekaligus sebagai sumber pendapatan yang berhasil guna. Salah satunya yakni Didalam beberapa tahun terakhir , adanya beberapa penelitian-penelitian yang melakukan analisis tentang efektivitas dan efisiensi pemungutan retribusi dan pajak daerah. Upaya tersebut dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah dalam menentukan kebijaksanaan dalam mengelola retribusi atau pajak daerah masing-masing.

Dalam penelitian ini , merupakan kategori intensifikasi sebagaimana yang diuraikan oleh Widayat (1994:hal.32) serta akan digunakan alat analisis sebagaimana yang diaplikasikan oleh Mardiasmo dan Makhfatih (2000) dalam penelitian tentang penghitungan potensi pajak dan retribusi daerah di Magelang.

Berdasarkan karakteristik realitas atau kondisi obyektif dilapangan dapat ditarik asumsi, bahwa realisasi dan jumlah kendaraan mengandung hubungan persamaan matematis yakni berbanding lurus, yang berarti bila jumlah kendaraan meningkat maka realisasi juga meningkat. Komponen (variable) biaya pungut yang ditetapkan secara pasti dalam peraturan daerah hanya berupa upah pungut (komisi)

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka untuk selanjutnya bilamana memungkinkan terhadap perhitungan efisiensi, total biaya pungut akan diasumsikan sebagai 5 % dari total biaya belanja rutin Dinas Pendapatan Daerah atau DLLAJ. Ditambah dengan 5% dari hasil pungut (realisasi) sebagai upah pungut sebagaimana disebutkan diatas. Oleh karena bila hanya dengan menggunakan upah pungut sebesar 5% dari realisasi , sedangkan biaya lainnya diabaikan karena termasuk dalam biaya rutin , maka tingkat efisiensi sudah jelas tergolong tinggi. Rendahnya target penerimaan Retribusi Terminal karena penentuannya hanya didasarkan pada realisasi tahun sebelumnya dengan penambahan tingkat persentase tertentu.



3.2 Tempat Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis mengadakan penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA), Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

3.3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan Data berkaitan dengan penelitian ini dikumpul dengan cara :

1. Penelitian kepustakaan (Library Research)

Yaitu suatu bentuk penelitian yang menggunakan sarana kepustakaan dengan menelaah bahasan teoritis dari berbagai literature, referensi bahan-bahan kuliah. buku-buku, bulletin, artikel-artikel dan hasil penelitian yang ada berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

2. Penelitian lapangan (Field research)

Yaitu suatu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan dalam hal ini kepada instansi serta aparat pemerintah yang mempunyai kaitan langsung dengan permasalahan yang akan dibahas.

Penelitian yang dimaksud adalah dalam bentuk pengumpulan data dan informasi yang diperlukan.

3.4. Jenis dan Sumber Data

3.4.1. Jenis Data

a. Data Kualitatif

Data ini merupakan data yang diperoleh baik lisan maupun tulisan yang berhubungan dengan penulisan

b. Data Kuantitatif

Data ini merupakan data yang berupa data time series tentang perkembangan penerimaan retribusi secara umum, Retribusi Terminal, selama periode 1999-2004, Pendapatan Asli daerah, dan data-data lain yang mendukung Penulisan.

3.4.2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari instansi-instansi terkait berupa data statistic maupun berupa data/bahan informasi tertulis lainnya, seperti dokumen serta literature lainnya.

Adapun sumber data diperoleh dari :

- Dinas Pendapatan Daerah Kab.Pangkajene dan Kepulauan
- Dinas Perhubungan Kab.Pangkajene dan Kepulauan
- BPS Kab.Pangkep

3.5. Metode Analisis

Analisis Efektivitas

Analisis ini untuk mengukur hubungan antara realisasi penerimaan retribusi terminal terhadap Target retribusi terminal . Untuk penelitian ini analisis efektivitas digunakan formulasi sebagai berikut (Machfud sidik, 2002)

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal}}{\text{Target Retribusi Terminal}} \times 100\%$$

Pengukuran efektivitas ini mempunyai indikator :

90 % kebawah dikategorikan tidak efektif

91 % - 95 % dikategorikan cukup efektif

96% ke atas dikategorikan efektif

Analisis Efisiensi (Daya Guna)

Analisis ini digunakan untuk mengukur bagian dari realisasi penerimaan retribusi terminal yang digunakan dalam menutup biaya pungutan. Bila biaya pungutan ditekan serendah mungkin, maka nilai efisiensi akan menjadi lebih besar.

Rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal}}{\text{Biaya pungutan retribusi terminal}} \times 100\%$$

Pengukuran Efisiensi ini mempunyai indikator :

50 % < kebawah dikategorikan tidak efisiensi

50 % - 75 % dikategorikan cukup efisiensi

75% - 85 dikategorikan efisiensi

85% > dikategorikan sangat efisiensi

Analisis Potensi

Alat analisis yang digunakan untuk menghitung potensi penerimaan Retribusi Terminal dengan menggunakan formula (Mardiasmo, 2000) sebagai berikut :

$$\text{PRT} = (\sum K_m \times \sum RK \times 358)$$

Dimana :

- RK = Retribusi yang dikenakan
PTT = Potensi Retribusi Terminal
Km = Kendaraan Yang Masuk perhati

Sedangkan Untuk mengetahui besarnya kontribusi retribusi terminal terhadap Pendapatan Asli Daerah (Nurjama Arsad, 1992 : 62) digunakan rumus sebagai berikut :

$$K = \frac{RT}{Y} \times 100\%$$

Dimana :

K = Besarnya Kontribusi Retribusi Terminal terhadap
PAD

RT = Retribusi Terminal

Y = Pendapatan Asli Daerah

3.6. Batasan Variabel

1. Efektifitas yaitu mengukur hubungan antara hasil pungut (nilai realisasi) retribusi dengan potensi retribusi (target) indikator efektifnya penerimaan retribusi terminal terhadap Target retribusi terminal antara lain :

90 % kebawah dikategorikan tidak efektif

91 % - 95 % dikategorikan cukup efektif

96% ke atas dikategorikan efektif

2. Efisiensi diuraikan sebagai salah satu alat untuk mengukur bagian dari retribusi yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan retribusi yang bersangkutan indicator efisiensinya belanja rutin dinas yang berkaitan dapat dilihat sebagai berikut:

50 % < kebawah dikategorikan tidak efisiensi

50 % - 75 % dikategorikan cukup efisiensi

75% - 85 dikategorikan efisiensi

85% > dikategorikan sangat efisiensi

3. Potensi adalah salah satu alat untuk mengukur atau memprediksi tingkat pertumbuhan periode yang akan mendatang

4. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

5. Penerimaan Retribusi terminal yang diteliti mulai dari tahun 2000-2005

6. Hari Efektif Pemungutan Retribusi Terminal sebanyak 358 Hari kerja

(Perda No.17 Thn.1998)

3.7. Sistematika Pembahasan

Sistem Pembahasan yang dilakukan dalam penulisan ini disusun dengan urutan sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, masalah pokok, tujuan dan kegunaan penulisan.

Bab II: Landasan Teoritis

Bab ini menguraikan tentang beberapa tinjauan pustaka mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ruang lingkup pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini mencakup tempat penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, metode analisis dan sistematika pembahasan.

Bab IV: Pembahasan

Bab ini menguraikan tentang pembahasan dari hasil penelitian

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Pangkep

A. Letak Geografis

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) merupakan salah satu kabupaten dari 23 kabupaten dan kota di provinsi Sulawesi Selatan. Daerah ini membentang dari Barat ke Timur pada Bagian Utara Propinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 1.122,29 km², terbagi atas 12 kecamatan, 36 kelurahan, dan 64 desa, dengan jumlah penduduk sekitar 300000 jiwa

Pangkajene adalah ibukota Kabupaten Pangkep, terletak 51 km arah utara Kota Makassar , dapat ditempuh sekitar 1 sampai 1,5 jam dengan kendaraan mobil dari kota makassar.

Daerah ini berada pada posisi 4°40' sampai 8°00' Lintang Selatan dan 110°0' sampai 113°0' Bujur Timur. Kabupaten pangkep berbatasan dengan Kabupaten Maros di Sebelah Selatan. Kabupaten Bone di Sebelah Timur, dan Kabupaten Barru di sebelah Utara

Kabupaten Pangkep mempunyai iklim tropis . Bulan Desember sampai Pertengahan Bulan Juli merupakan Musim Hujan dan musim kemarau jatuh antara bulan Juli sampai November. Temperatur udara rata-rata 21 sampai 31°C. Wilayahnya terdiri dari daratan, pegunungan dan kepulauan , berada pada ketinggian 0 hingga 1000 meter lebih diatas permukaan laut.

4.2. Sumber-Sumber Penerimaan Daerah Kabupaten Pangkep.

Menurut Penjelasan Undang-Undang No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menerangkan bahwa :

“” Pendapatan Asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku . dari beberapa sumber-sumber yang telah digali untuk mendapatkan hasil, guna untuk membiayai pembangunan didaerah dengan menggunakan peraturan-peraturan daerah tersebut.

Dari pengertian diatas kemudian di perjelas pada bagian kedua , pasal 4 Undang-Undang no. 25 tahun 1999 mengenai pos-pos penerimaan daerah dan daplikasikan melalui laporan target dan realisasi penerimaan pemerintah Kabupaten Pangkep tahun anggaran 2005 sebagai berikut :

A. PENDAPATAN ASLI DAERAH

I. Pajak Daerah

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan jalan
6. Pajak Pengambilan dan Penggolongan Bahan Galian Golongan C
7. Pajak Pengambilan Hasil Kekayaan Laut.

II. Retribusi Daerah

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - a. *Pelayanan Kesehatan Dinas kesehatan*
 - b. *Pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum*
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
3. Retribusi Pengg. Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil
4. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
5. Retribusi Pelayanan Pasar
6. Retribusi Penggujian Kendaraan Bermotor
7. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam kebakaran
8. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
9. Retribusi Jasa Usaha Grosir atau Pertokoan
10. Retribusi jasa Usaha Terminal
11. Retribusi Jasa Usaha Tempat Penginapan / Villa
12. Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan
13. Retribusi Jasa Pelabuhan Sungai dan Tempat Pend.Kapal
14. Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olah Raga
15. Retribusi Jasa Usaha Penjualan Produksi Usaha Daerah
16. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
17. Retribusi Izin Gangguan
18. Retribusi Izin Trayek
19. Retribusi Dispensasi Penggunaan Jalan Daerah
20. Retribusi Pelataran

21. Retribusi Izin Peruntukan Tanah
22. Retribusi Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan
23. Retribusi Pengelolaan Air Irigasi
24. Retribusi Pangkalan Tera
25. Retribusi Jasa KetataUsahaan
26. Retribusi Pendaftaran Pemberian STKK & Kesempurnaan Kapal
27. Retribusi Izin Usaha Konstruksi

III. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah

Yang Dipisahkan

1. Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah
2. Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank

IV. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
2. Penerimaan Jasa Giro
3. Sumbangan Pihak Ketiga
4. Penerimaan Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah
5. Setoran Kelebihan Pemb. Pihak Ketiga
6. Lain- Lain Perimaan yang Sah

B. DANA PERIMBANGAN

I. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

1. *Bagi Hasil Pajak*
 - a. Pajak Bumi dan bangunan
 - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

- c. Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21
- 2. *Bagi Hasil Bukan Pajak*
 - a. Iuran Hasil Hutan
 - b. Iuran Explorasi dan Exploitasi
 - c. Sumber Daya Alam Perikanan / Pungutan Hasil Perikanan
 - d. Gas Alam
 - e. Pemberian Hak Atas Negara.

II. Dana Alokasi Umum

- 1. *Belanja Gaji Pegawai*
- 2. *Belanja Non Pegawai*

III. Dana Alokasi Khusus

- 1. *Non Reboisasi*
 - a. Bantuan Pendidikan
 - b. Bantuan Kesehatan
 - c. Bantuan Peningkatan Jalan
 - d. Bantuan Irigasi
 - e. Bantuan Air Bersih
 - f. Bantuan Kelautan
 - g. Bantuan Pertanian

- 2. *Reboisasi*

IV. Bagi Hasil Pajak Dan Bantuan Keuangan Dari Propinsi

- 1. *Bagi Hasil Pajak Propinsi*
 - a. Pajak Bea Balik Nomor Kendaraan

b. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

c. Pajak ABT

2. *Bantuan Keuangan Dari Propinsi*

a. Penyisihan Pendapatan PBB dari Pemerintah TK.1 kepada PEMDA/ Lurah

b. Bantuan Sistem Informasi Gaji dan Akuntansi Keuangan Daerah

V. Bagian Lain- Lain Pendapatan Yang Sah

1. *Bantuan Dana Kontigensi / Penyeimbang Kebijakan*

a. Bantuan Dana Kebijakan Dari Pemerintah (DP Gaji 13)

b. Penerimaan PBB dari Pemerintah Pusat

c. Penerimaan BPHTB dari Pemerintah Pusat

d. Biaya Pungut PBB

4.2. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah

Sesuai dengan prinsip kesatuan bahwa pemerintah daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat, atas dasar hal tersebut maka kemandirian daerah dalam rumah tangganya tidak ditafsirkan bahwa setiap pemerintah daerah dalam rumah tangganya tidak ditafsirkan bahwa setiap pemerintah daerah harus dapat membiayai seluruh pengeluaran dari PAD, sebagai tindak lanjut dari pemberian otonomi kepada daerah tingkat II agar dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan pemerintah

daerah maka upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah mutlak diperlukan untuk mengantisipasi pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Pemerintah Kabupaten Pangkep dalam usaha mengembangkan dan membangun daerahnya telah berupaya untuk meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki. Upaya tersebut dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD, agar peningkatan target setiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian realisasi secara konsisten.

Untuk mengetahui sejauh mana Pemerintah Kabupatenda Pangkep dalam mengelola sumber-sumber pendapatan Asli Daerah tersebut dan perkembangan didalam menunjang pelaksanaan pembangunan dan jalannya roda pemerintahan di kabupaten Pangkep, berikut ini penulis akan menyajikan data tentang perkembangan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah sejak tahun anggaran 2000 sampai 2004, dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1. Perkembangan Realisasi PAD Kabupaten Pangkep

Tahun 2000 – 2004

Tahun Anggaran	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Kenaikan
		%
2000/2001	10.013.118.202,23	



2001/2002	19.062.326.172,46	90,37 %
2002/2003	22.427.763.499,64	117,5%
2003/2004	25.466.804.817,82	13,5%
2004/2005	26.912.608.120,84	5,6%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten pangkep

Berdasarkan tabel 4.1 dapat kita simpulkan bahwa PAD kabupaten pangkep hampir secara keseluruhan dapat dikatakan meningkat seperti terlihat pada tahun anggaran 2001 realisasi penerimaan sebesar Rp.19.062.326.172,46 dimana terjadi peningkatan sebesar 9.049.207.970,23 dari tahun anggaran 2000 atau sebesar 90,37%. Tahun anggaran 2002 realisasi penerimaan sebesar Rp.22.427.763.499,64 dimana terjadi peningkatan Rp.22.408.701.173,18 atau 117,5% dari tahun anggaran 2001. Demikian juga tahun anggaran 2003 realisasi penerimaan PAD sebesar Rp.25.466.804.817,82. terjadi peningkatan sebesar rp. 3.093.041.318,18 atau sekitar 13,5% dari tahun anggaran 2002 . sedangkan realisasi penerimaan PAD pada tahun tersebut sebesar Rp.1.445.803.303,82 atau sekitar 5,6 % dari tahun anggaran 2003.

Kenaikan dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Pangkep tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari sumber pajak dan retribusi yang potensial salah satu termasuk peran retribusi terminal. Sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan tersebut dengan melalui penyederhanaan dan perbaikan sistem administrasi perpajakan nasional,

pengklasifikasian retribusi dengan kriteria tertentu, serta penyederhanaan tarif pajak dan retribusi yang kesemuanya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah.

Pemerintah menyadari bahwa PAD adalah merupakan bagian yang turut menentukan suksesnya pembangunan yang akan dilaksanakan maka pemerintah mengusahakan agar tidak terjadi penurunan atau minimal mempertahankan nilai yang ingin dicapai sebelumnya dengan jalan peningkatan pengawasan yang intensif dari petugas atau aparat yang bersangkutan serta memberikan penyuluhan –penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya PAD dalam menunjang pembangunan.

4.3. Target dan Realisasi Retribusi terminal di Kabupaten Pangkep Tahun

2000 – 2004

Pada tahun anggaran 2000 Retribusi Terminal mampu terealisasi sebesar Rp 64.106.000,00. Pada Tahun 2001 Retribusi Terminal mampu Terealisasi sebesar Rp.239.472.800,00

Selanjutnya Realisasi penerimaan retribusi Terminal pada tahun 2002 dengan nilai Rp.106.802.000,00 atau turun sebesar 3,4% dari target.penerimaan sedangkan untuk tahun 2003 Realisasi Penerimaan Retribusi terminal tingkat pencapaian penerimaan Retribusi Terminal dengan nilai Rp.110.474.000,00 dimana ada sedikit penurunan sebesar 2% dari target yang diinginkan. Dan terakhir pada tahun 2004 realisasi penerimaan retribusi Terminal sebesar Rp.146.018.600,00. untuk lebih lengkapnya target dan

realisasi Retribusi terminal Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Periode 2000-2004 dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini :

**Tabel 4.2. Target dan realisasi Retribusi Terminal di Kab.Pangkep
Tahun 2000 – 2005**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (RP)	Tingkat Realisasi dari Target (%)
2000	215.000.000	64.106.000	
2001	236.480.000	239.472.800	101,26
2002	110.600.000	106.802.000	96,56
2003	112.568.000	110.474.000	98.14
2004	146.064.000	146.018.600	99,97
2005	155.730.000	149.249.600	95,84%

Sumber : Dispenda kab.Pangkep

Kesemuanya ini merupakan implikasi diterapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 (revisi , UU No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah) dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Revisi UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah) dimana pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber-sumber pendapatan Asli Daerah dimana salah satu diantaranya adalah Retribusi Terminal.

Pada Periode Tahun 2004 Penerimaan Retribusi Terminal sebesar 99.97 % sedangkan untuk Periode tahun 2005 Penerimaan Retribusi terminal sebesar 95.84% atau kurang 4.16% dari target yang diinginkan.

4.4. Analisis Efektifitas

Untuk Perhitungan Rasio Efektivitas Retribusi Terminal dari Tahun ke Tahun Penulis Menggunakan formulasi Sbb :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi dari Penerimaan Retribusi Terminal}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Terminal}} \times 100\%$$

Untuk Tahun 2001

$$\text{Efektifitas} = \frac{239.472.800}{236.480.000} \times 100\% = 101,26\%$$

Dapat Dilihat bahwa indikator efektifnya retribusi terminal yakni

90 % kebawah dikategorikan tidak efektif

91 % - 95 % dikategorikan cukup efektif

96% ke atas dikategorikan efektif

Untuk Tahun 2002

$$\text{Efektifitas} = \frac{110.600.000}{106.802.000} \times 100\% = 96,56\%$$

Untuk Tahun 2003

$$\text{Efektifitas} = \frac{112.568.000}{110.474.000} \times 100\% = 98,14\%$$

Untuk Tahun 2004

$$\text{Efektifitas} = \frac{146.064.000}{146.016.800} \times 100\% = 99,97\%$$

Untuk Tahun 2005

$$\text{Efektifitas} = \frac{155.730.000}{149.249.600} \times 100\% = 95,84\%$$

Dari Perhitungan diatas menunjukkan bahwa penerimaan retribusi terminal dari tahun ke tahun Efektif, kecuali tahun 2000 dimana target tidak tercapai sama sekali. Sedangkan untuk tahun-tahun selanjutnya penerimaan retribusi di tahun 2001 penerimaan retribusi itu sebesar 101,26% (efektif) dimana realisasi penerimaan Rp.239.472.800. Di Tahun 2002 penerimaan Retribusi Terminal sebesar 96,56%(Efektif) dimana turun 4,7 % dari tahun sebelumnya. Dan di tahun 2003 penerimaan Retribusi Terminal mencapai 98,14% (Efektif) dan adanya peningkatan dari tahun sebelumnya. Terakhir di tahun 2004 penerimaan Retribusi Terminal mampu mencapai 99,97%(efektif) dalam hal ini realisasi penerimaan sebesar Rp. 146.018.600,00

4.5 Analisis Efisiensi

Daya guna Retribusi atau efisiensi retribusi merupakan tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan penerimaan retribusi terhadap sejumlah pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan untuk memungut suatu retribusi .

Apabila komponen biaya pungut selain upah pungut dapat diminimalkan , maka jelas bahwa tingkat efisiensi retribusi dapat dikatakan tinggi namun biaya tersebut belum ditetapkan secara terpisah dari biaya atau belanja rutin instansi yang dikhususkan kepada instansi yang terkait dengan hal retribusi terminal dalam hal ini pihak DLLAJ kabupaten Pangkep.

Dalam rangka meminimalisir biaya pemungutan retribusi terminal , dan ynag menjadi fokus dalam hal ini adalah kondisi dimana lokasi objek pemungutan tidak banyak dan tidak membuthkan tenaga lapangan atau biaya transportasi , selain itu karena adanya penggunaan bahan cetakan dan tenaga administrasi, walaupun sedikit , maka asumsi tersebut dapat digunakan dalam rangka meningkatkan efisiensi retribusi terminal Kab.Pangkep

**Tabel 4.3 Belanja Rutin Dinas Perhubungan Kab.Pangkep
Tahun Anggaran 2001 s/d 2005**

Tahun Anggaran	Biaya Pegawai	Biaya Barang dan Jasa	Biaya Pemeliharaan	Total
2001	375.000	1.000.000	67.700.000	69.075.000
2002	2.000.000	2.100.000	53.110.000	57.210.000
2003	430.000	1.500.000	64.820.000	66.750.000
2004	500.000	1.500.000	71.910.000	73.910.000
2005	4.000.000	2.000.000	193.200.000	199.200.000

Sumber: Dina Perhubungan Kabupaten Pangkep

Dari Tabel.4.4 diatas dapat dilihat pada tahun 2001 biaya operasional untuk dinas perhubungan jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai realisasi penerimaan pada yakni sebesar Rp. 69.075.000 . Di tahun 2002 adanya penurunan total biaya operasional, hal ini tak lepas dari pengawasan dari Dinas perhubungan selaku instansi yang berkaitan. Adapun total biaya

operasional pada tahun tersebut sebesar Rp. 57.210.000. Pada Tahun 2003 Total biaya operasional mencapai sebesar Rp.66.750.000. dan di tahun 2004 Total biaya operasional jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai realisasi penerimaan retribusi terminal sebesar Rp 73 910 000,- pada tahun 2004. Pada Tahun 2005 total biaya operasional meningkat sebesar 59,8% dari tahun 2004 dengan nilai Rp 199 200 000,-. Hal Demikian disebabkan karena adanya rehabilitasi terminal dan kantor terminal pangkep dan pada sisi lain berdampak pada jumlah penggunaan jasa terminal pangkep yang menurun akibatnya pada penerimaan jasa terminal menurun pula dari tahun 2004. Sehingga besarnya biaya operasional terminal pada tahun 2005 jauh lebih besar dibandingkan dengan realisasi penerimaannya . Kondisi demikian tentunya akan berpengaruh terhadap tingkat efisiensi retribusi terminal pada Kab. Pangkajene dan Kepulauan.

Untuk lebih jelasnya untuk perhitungan Efisiensi Retribusi terminal pada tahun 2004 sampai dengan 2005 dapat kita lihat tabel 4.5 dibawah ini.

Tabel 4.4
Perhitungan Efisiensi Retribusi Terminal Di
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun Anggaran 2001 s/d 2005

Tahun Anggaran	Biaya Pungut	Realisasi Penerimaan	Efisiensi
2001	69.075.000	239.472.800	346.7%

2002	57.210.000	106.802.000	186.7%
2003	66.750.000	110.474.000	165.5%
2004	73.910.000	146.018.600	197,6%
2005	199.200.000	140.440.000	0.70%

Sumber : DASK Dinas Perhubungan

Hasil olahan data pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir terjadi naik turunnya tingkat efisiensi yakni dimana tahun 2001 tingkat efisiensi dari pemungutan biaya retribusi terminal tergolong sangat efisien yakni sebesar 346,7% dan begitupula pada tahun berikutnya di tahun 2002 tingkat efisiensinya mencapai 186,7% dan masuk dalam golongan sangat efisien. Pada tahun 2003 tingkat efisiensinya pun masuk dalam golongan sangat efisien mengingat tingkat efisiensi dari pemungutan retribusi terminal Kabupaten Pangkajene dan kepulauan sebesar 165,5% .Di tahun 2004 tingkat efisiensi dari pemungutan retribusi terminal kabupaten Pangkep sebesar 197,6% yang tergolong sangat efisien menjadi tidak efisien pada tahun 2005 sebesar 0,70 %.Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan upah pegawai dan biaya rehabilitasi kantor terminal dan terminal pangkep.pada sisi lain adanya penurunan realisasi penerimaan kabupaten pangkep hal demikian bukan karena tarif yang dikenakan pada jenis kendaraan yang menggunakan jasa terminal namun akibat aktivitas rehabilitasi terminal dan kantor terminal sehingga menyebabkan jumlah penggunaan jasa terminal pangkep berkurang berimplikasi pada menurunnya tingkat realisasi penerimaan retribusi terminal

4.6 Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Terminal

Dari data yang diperoleh di dinas perhubungan tabel 4.4. menunjukkan jumlah dan jenis kendaraan pemakai jasa terminal di Kab.Pangkep Periode 2004-2006 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5. Jenis Kendaraan Yang Beroperasi

Tahun	Jenis Kendaraan			
	Angkutan Umum dalam Kota (unit)	Angkutan Umum antar kota (Unit)	Bus Kecil dalam Kota	Bus Kecil Antar Kota
2004	42	346	247	169
2005	50	350	215	170
2006	60	365	215	170

Sumber : DASK Dinas Perhubungan Kab.Pangkep

Dan berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 3 tahun mulai tahun 2004 sampai dengan 2006 menunjukkan jumlah dan jenis kendaraan pemakai jasa terminal menunjukkan adanya peningkatan pemakai jasa terminal pangkep meskipun jumlah bus kecil dalam kota yang menggunakan jasa terminal penumpang pangkep mengalami penurunan..

Dimana pada tahun 2004 jumlah angkutan umum dalam kota yang memakai jasa terminal Pangkep sebanyak 42 unit dan pada tahun 2005 jumlah penggunaan jasa terminal Pangkep sebanyak 50 unit atau meningkat sebesar 19,05% dari tahun 2004 . Sedangkan pada tahun 2006 ,telah terjadi

peningkatan jumlah angkutan umum dalam kota sebesar 20 % dari tahun 2005 dengan jumlah kendaraan sebesar 60 unit. Untuk umum antar kota pada tahun 2004 sebanyak 346 unit dan pada tahun 2005 sebesar 350 unit atau meningkat sebesar 1,15 % dari tahun 2004 serta pada tahun 2006 sebesar 365 unit meningkat sebesar 4,28% dari tahun 2005. Untuk bis kecil dalam kota pada tahun 2004 sebanyak 247 unit dan pada tahun 2005 mengalami jumlah pemakai jasa terminal Pangkep sebanyak 215 unit atau mengalami penurunan sebesar 12,95% dari tahun 2004 dan pada tahun 2006 jumlah penggunaan jasa terminal sebanyak 215 unit atau jumlahnya konstan. Untuk bis antar kota pengguna jasa terminal pangkep sebanyak 169 unit dan pada tahun 2005 sebanyak 170 unit atau bertambah 1 unit dari tahun 2004. Pada tahun 2006 jumlah pengguna jasa terminal Kabupaten Pangkep menunjukkan angka yang konstan dari tahun 2005 sebanyak 170 unit. Data yang ditampilkan dalam tabel 4.4 tersebut diatas merupakan hasil data yang diambil dari Dokumen anggaran satuan kerja Dinas perhubungan Kabupaten Pangkep pada kurun waktu 2004 – 2006 . Untuk mendapatkan potensi perhitungan retribusi terminal Kabupaten Pangkep , jika dilihat dari jumlah kendaraan yang menggunakan jasa terminal pangkep kemudian dikalikan dengan jenis tarif yang diberlakukan untuk setiap jenis kendaraan dan kemudian dikalikan lagi dengan interval waktu Perhitungan itu dimaksudkan untuk mencapai nilai potensi akurat selama setahun. Perhitungan potensi sebagaimana dimaksud diatas menggunakan rumus : jumlah kendaraan X tarif X 358 hari)

Tabel.4.6.Perhitungan Potensi Retribusi Terminal Kab.Pangkep

Tahun anggaran 2004-2006

TAHUN	JENIS KENDARAAN				TOTAL
	Angk.Umum dalam Kota	Angkutan Umum antar Kota	Bis Kecil dalamKota	Bis Kecil antar Kota	
	TARIF				
	Rp.600	Rp.400	Rp.600	Rp.800	
2004	Rp.9.021.600	Rp.49.547.200	Rp.53.055.600	Rp.48.401.600	Rp.160.026.000
2005	Rp.10.740.000	Rp.50.120.000	Rp.46.182.000	Rp.48.688.000	Rp.155.730.000
2006	Rp.12.888.000	Rp.52.268.000	Rp.46.182.000	Rp.48.688.000	Rp.160.026.000

Sumber : DASK Dinas Perhungan Kab.Pangkep

Dari hasil perhitungan ditemukan bahwa besar potensi untuk tahun 2004 yaitu sebesar Rp 160.026.000,-,Adapun target tersebut dan realisasi tahun 2004 masing masing Rp 146.064.000,- dan Rp 146 .018. 000, dengan kata lain nilai target terealisasi sebesar 99,97% .Dan besarnya potensi untuk tahun 2005 sebesar.Rp.155.730.000 dan adapun target dan realisasi pada tahun terebut untuk target Rp.155.730.000 dan Rp.149.249.600 atau mencapai 95,84% dari target penerimaan-.Point penting yang patut dicernati dari data diatas bahwa nilai target hampir mendekati nilai realisasi atau dan penetapan targetan penerimaan jasa terminal belum berada pada kondisi potensialnya.Hal ini

disebabkan karena penetapan nilai targetan penerimaan tidak berdasarkan kondisi potensialnya.

4.7. Hubungan antara Target, Potensi dan Realisasi

Tabel 4.7. Hubungan Antara Potensi dan Realisasi Penerimaan Retribusi

Terminal kab. Pangkep

TAHUN	TARGET (Rp)	POTENSI (Rp)	REALISASI (Rp)
2004	146.064.000	160.026.000	146.018.600
2005	155.730.000	155.730.000	149.249.600

Adapun Hubungan antara Target dan realisasi penerimaan retribusi terminal pada tahun 2004 memiliki hubungan yang saling memberi kontribusi bagi penerimaan daerah yakni pada tahun 2004 Target dari penerimaan retribusi terminal ini mencapai Rp.146.064.000, begitupula dengan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal pada tahun yang sama sebesar Rp.146.018.000 namun di tahun 2004, Potensi penerimaan retribusi terminal kab.pangkep diperkirakan mencapai Rp.160.026.000 hal ini merupakan salah satu kekurang perhatiannya pemerintah daerah kab.pangkep dalam mengelola terminal pada tahun tersebut. Pada tahun 2005 target dan potensi dari penerimaan retribusi terminal kab.pangkep mencapai Rp.155.730.000 sedangkan realisasi penerimaan retribusi terminal di tahun yang sama hanya mampu mencapai Rp.149.249.600.

4.8. Kontribusi Penerimaan Retribusi Terminal Terhadap PAD

Untuk menghitung besarnya kontribusi Retribusi Terminal terhadap Pendapatan Asli Daerah digunakan rumus :

$$K = \frac{RT}{Y} \times 100\%$$

Dimana :

K = Besarnya Kontribusi Retribusi Terminal

Y = Pendapatan Asli Daerah

RT = Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal

Untuk Kontribusi Retribusi Terminal pada Tahun 2000

$$K = \frac{64.106.000}{10.013.118.202} \times 100\%$$

$$K = 0,64 \%$$

Pada tahun 2001 retribusi terminal mengalami peningkatan yang cukup signifikan

$$K = \frac{239.472.800}{19.062.326.172} \times 100\%$$

$$K = 1.26\%$$

Kontribusi Terminal Tahun 2002

$$K = \frac{106.802.000}{22.427.763.499} \times 100\%$$

$$K = 0,47\%$$

Pada tahun 2003

$$K = \frac{110.474.000}{25.466.804.817} \times 100\%$$

$$K = 0,43\%$$

Dari hasil Perhitungan diatas dapat dijelaskan bahwa tampaknya kontribusi retribusi terminal dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan yang cukup pesat dari segi jumlah nominal yang terealisasi meskipun persentase dari tiap tahunnya masih jauh lebih kecil dari total penerimaan realisasi PAD sesungguhnya.hal ini tidak jauh disebabkan oleh banyaknya sumber-sumber penerimaan pendapatan dari dinas pendapatan daerah. Dari gambaran tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 perbedaannya terasa cukup signifikan dimana dari jumlah penerimaan retribusi terminal di tahun 2000 sebesar Rp.64.106.000 (enam puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) di tahun 2004 sebesar Rp. 146.018.600 (Seratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Belas Ribu Enam Ratus Rupiah) sehingga yang tadinya memberikan kontribusi sebesar 0,64 % dan di tahun 2004 menjadi 0,54%. Dan diharakan ke depannya akan lebih meningkatkan serta menjadikan retribusi terminal sebagai kebanggaan tersendiri bagi Dinas Pendapatan Daerah Kab. Pangkep dalam terus menggiatkan sektor ini.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.8.
Kontribusi Retribusi Terminal Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab
Pangkep

Tahun	Realisasi		Persentase (%)
	Retribusi Terminal	P.A.D	
2000	64.106.000	10.013.118.202	0,64
2001	239.472.800	19.062.326.172	1.26
2002	106.802.000	22.427.763.499	0.47
2003	110.474.000	25.466.804.817	0.43
2004	146.018.600	26.912.608.120	0.54

Sumber : Dispenda Kab.Pangkep

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan Dan Saran

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah , sebagian besar atau mungkin keseluruhan Pemda di tanah air mulai pula membenahi manajemen penerimaan daerahh, khususnya yang berhubungan dengan peningkatan PAD. Berbagai penelitian yang diacu dalam penelitian ini mengungkapkan permasalahan sekitar peningkatan PAD dari berbagai komponen sumber penerimaan yang sesuai dengan undang-undang . penelitian inii termasuk salah satu penelitan yang membahas tentang upaya peningkatan PAD dengan kategori intensifikasi . Intensifikasi dimaksudkan sebagai pendekatan yang mengupayakan peningkatan PAD dari optimalisasi potensi penerimaan daerah (Pajak dan retribusi) sehingga mendekati tingkat riil.

Retribusi Terminal di Kabupaten Pangkep telah mengalami penningkatan yang berarti seiring dengan meningkatnya kendaraan setiap tahunnya pula. Peningkatan tersebut diketahui sebagai berbanding lurus, hal ini dimungkinkan karena masyarakat didaerah menggunakan kendaraan tidak banyak untuk konsumtif fibandingkan masyarakat perkotaan secara umum.

5.1.1Kesimpulan

1. Peningkatan realisasi retribusi terminal yang dicapai cukup optimal sebagaimana diketahui dari perhitungan efektivitas yang tergolong efektif yaitu Dari Perhitungan diatas menunjukkan bahwa penerimaan retribusi terminal dari tahun ke tahun Efektif, kecuali tahun 2000 dimana target tidak tercapai sama sekali.

Sedangkan untuk tahun-tahun selanjutnya penerimaan retribusi di tahun 2001 penerimaan retribusi itu sebesar 101,26% (efektif) dimana realisasi penerimaan Rp.239.472.800. Di Tahun 2002 penerimaan Retribusi Terminal sebesar 96,56%(Efektif) dimana turun 4,7 % dari tahun sebelumnya. Dan di tahun 2003 penerimaan Retribusi Terminal mencapai 98,14%

(Efektif) dan adanya peningkatan dari tahun sebelumnya. Terakhir di tahun 2004 penerimaan Retribusi Terminal mampu mencapai 99,97%(efektif) dalam hal ini realisasi penerimaan sebesar

Rp. 146.018.600,00

2. Perhitungan Tingkat efisiensi untuk tahun 2001-2005 menggunakan penyesuaian dengan komponen biaya pungut dari belanja rutin Dinas Perhubungan. Hasil Perhitungan efisiensi diketahui bahwa tingkat efisiensi pada tahun 2001 tergolong sangat efisien yakni sebesar 346,7% dan di tahun 2002 perhitungan tingkat efisiensi dalam pemungutan retribusi terminal tergolong sangat efisien yakni sebesar 186,7% begitupula pada tahun 2003 masih tergolong sangat efisien karena dalam pemungutan retribusi terminal sebesar 165,5% .Pada tahun 2004 tergolong sangat efisien yakni sebesar 197,6 %. Sedangkan pada tahun 2005 tingkat efisiensi dari retribusi terminal mengalami penurunan ,yakni tidak efisien dengan persentase sebesar 0,70 %.. Tingkat Efisiensi diatas tersebut menjelaskan bahwa pengeluaran atau biaya pungut dari dinas yang bersangkutan untuk biaya operasional masih perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah.
3. Perhitungan Potensi retribusi terminal dari tahun 2004 yakni diperkirakan sebesar Rp.160.026.000 dan di tahun yang sama realisasi penerimaan retribusi terminal

kab.pangkep hanya mampu mencapai Rp146.018.600 dan pada tahun 2005 potensi penerimaan retribusi terminal itu mencapai Rp.155.730.000 sedangkan penerimaan dari retribusi terminal kab.pangkep tersebut mencapai Rp. 149.249.600

5.1.2.Saran-Saran

1. Agar memprioritaskan upaya peningkatan penerimaan retribusi terminal dengan mengevaluasi serta meningkatkan sistem yang telah diimplementasikan.
2. Mengajak Peran serta masyarakat sehingga dapat membantu menyediakan sumber informasi guna bahan mengevaluasi secara berkala tingkat perkembangan penerimaan retribusi pada umumnya, khususnya mengenai kapasitas membayar masyarakat dan peningkatan efisiensi pelayanan.
3. Bahwa Pemda Pangkep masih kurang memperhatikan akan upaya penerimaan retribusi terminal dan belum mampu mengoptimalkan potensi dari retribusi terminal . baik itu dari segi fisik dari prasarana terminal yang dianggap berpotensi untuk berkembang dan upaya-upaya lain Pemda dalam memaksimalkan penerimaan retribusi terminal

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, **Undang-Undang nomor 32 tahun 2004** tentang Pemerintah Daerah
- Anonim, **Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004** tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- Anonim, 2000, **Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2000**, tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. CV.Novindo Pustaka Madiri, Jakarta.
- Bohari,SH. 1984,**Pengantar Perpajakan**. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- DISHUB.2001-2005, **Dokumen Anggaran Satuan Kerja**, Tidak diterbitkan
- Davey,K.J. 1988, **Pembiayaan Pemerintah Daerah**, Terjemahan Oleh Amanullah, Hambani Amin, A.T.Pakpahan, Busrori, Bahrul Elmi; Pendamping Sunoro Usman UI-Press, Jakarta
- Devas, N., Binder, dkk., 1989, "**Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia**, UI-Press, Jakarta,
- Goedharth, C, 1982, **Garis-Garis Besar Keuangan Negara**, Terjemahan Ratmoko, Jembatan Jakarta.
- Harits, Benyamin, 1995, "**Peran Administrator Pemerintah Daerah, Efektifitas Penerimaan Retribusi Daerah Pemda Tingkat II Se-JawaBarat**", Prisma, No.4, Tahun XXIV,
- Kesit,Bambang Prakosa,2003, **Pajak dan Retribusi Daerah**, UII Press,Jakarta
- Lubis, I.1985, **Pengendalian dan Pengawasan Proyek dalam Manajemen**,Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Mangkoesubroto, Suritna, 1993. **Ekonomi Publik**, Edisi ketiga
- Mardiasmo dan Makhfatih, A, (2000), **Penghitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang**, kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dengan Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi Universitas Gadjah Mada.
- McQueen, Jim, (1998), "Development of a Model for User Fees, " **A Model on Policy Development in Creating and Maintaining User Fees For Municipalities**", MPA Research Paper, Penerbit: The Local Government Program, Dept. Of Political Science, The Univ. Western Ontario, Aug. 1998, 1-23. (Terjemahan)
- Musgrave, 1993. **Keuangan Negara dalam Teori Dan Praktek**, Edisi Kedua, (Terjemahan : Alfonsus Sirait, dkk), Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Pamudji, **Pembinaan Perkotaan di Indonesia**, Eresco, Jakarta, 1980
- Prawirohardjono, S. 1984, **Dasar-dasar Ilmu Keuangan Negara**, Balai Penerbit UGM, Yogya.
- Saragih, J. Panglima, (1996), "Peningkatan Penerimaan Daerah sebagai sumber **Pembiayaan Pembangunan**" Majalah Perencanaan Pembangunan, No.6, 36-43
- Sodang, S.P. 1996, **Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen**, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soedargo, R, 1980, **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, NV ERESKO, Bandung
- Suparmoko, M. 1992. **Keuangan Negara, Dalam Teori dan Praktek**, Edisi Empat, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta

Sidik, Dkk, 2002. **Keuangan Negara dan Daerah**, BPFE-UGM, Jakarta

Widayat, Wahyu, 1994, “ **Maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah Sebagai Kekuatan Ekonomi Daerah**”, Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Edisi September 1994, 28-34

Yani,Ahmad, 2002. **Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia**, Edisi I, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta

LAMPIRAN - LAMPIRAN